

## Daftar Pustaka

### Buku

- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Darmodiharjo, Darji S.H. dan Shidarta, S.H., M.Hum. 2008. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Friedrich, C. J. (2004). *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- Gandasubrata, Purwoto. *Renungan Hukum*. Ikatan Hakim Indonesia. Maret 1998, hlm. 65.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kebudayaan, D. P. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mamudji, S., & Soekanto, S. (2011). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mertokusumo, Sudikno. 2005. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Mochtar, Z. A. (2017). *Lembaga Negara Independen*. Depok: Rajawali Pers.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nurtjahjo, H. (2005). Lembaga, Badan dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara. *Hendra Nurtjahjo, "Lembaga, Badan dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agency) Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke-35, No. 3, 10.*
- Prinst, Darwan. (2002). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- RI, L. A. (2008). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Soehino. (2005). *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Soekanto, S. (1981). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Suharto, Edi. (2008). *Pekerjaan Sosial dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, Bandung: PT. Revika Aditama Bandung.

### **Jurnal**

Badjuri, A. (2011). *Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Lembaga Anti Korupsi di Indonesia*. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Vol. 18, No. 1.

Endarto. (2014). *Kendala KPK dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. *Jurnal Lingkar Widyaswara*, Vol. 14, No. 2.

Nur Atnan. (2014). *Fenomena Korupsi Pejabat Publik di Jawa Barat*. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* Vol. 2, No. 2.

Suwarnatha, I. N. (2012). *Penguatan Eksistensi Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Undang-undang Dasar 1945*. *Jurnal Konstitusi* Vol. II No. 1.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (t.thn.).

Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. (t.thn.).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang No 11 Tahun 2009, kesejahteraan sosial.

Undang-undang No 6 tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.

Undang-undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 18.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

KUHP

### **Internet**

<http://jojogaolshwordpress.com/2010/10/12/pengertian-dan-macam-macam-putusan/> diakses pada tanggal 26 Oktober 2018.

Komisi Pemberantasan Korupsi, "Fungsi dan Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi" (<https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/fungsi-dan-tugas/>, diakses pada 10 Agustus 2018, 2018)

BBC News, "Vonis Anas Urbaningrum" ([https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2014/09/140924\\_vonis\\_anas\\_urbaningrum/](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/09/140924_vonis_anas_urbaningrum/), diakses pada 20 Agustus 2018)

### **Skripsi**

Indah, Cempaka. *Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No. 272/PK/PID.SUS/2011)*

Paturusi, Azharul Nugraha Putra. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara (Studi Putusan No. 41/PID.SUSTPK2015/PN.MKS). 2017*

Islami, Rahmat. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No. 99/PID.Sus/2013/PNMKS)*

**Tesis**

Anggini, Amelia Dewi. Thesis: “Penerapan Trading in Influence dalam United Nation Convention Against Corruption Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia” (Yogyakarta: UGM, 2015).

Hamzah, M. Guntur. *Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral dan Doktrin Hukum dalam Pertimbangan Putusan Hakim*. (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2007).

